

Intellectual Capital Disclosure: Studi Pengungkapan Teknologi Informasi pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia

Devi Narulitasari¹, Djoko Suhardjanto²

Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret

devina_edu@yahoo.com¹, djoko.suhardjanto@yahoo.com²

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengungkapan teknologi informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia dan mengetahui hubungan karakteristik Pemerintah Daerah terhadap pengungkapan teknologi informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia.

Penelitian termasuk penelitian kuantitatif yang menggunakan metode purposive sampling dalam penentuan sampelnya. Sampel yang digunakan sebanyak 170 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun anggaran 2014. Alat analisis yang digunakan adalah regresi logistic dengan variabel dependen pengungkapan teknologi informasi dan variabel independen size, wealth, age, debt financing, intergovernmental revenue, serta Jawa non Jawa. Hasil dari penelitian ini menunjukkan pengungkapan teknologi informasi masih tergolong rendah yaitu 38,2 %. Hal ini menunjukkan belum adanya kesadaran dan pemahaman yang baik dari Pemerintah Daerah untuk mengungkapkan teknologi informasi karena masih bersifat voluntary, selain itu juga karena keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki. Hasil lainnya adalah variabel intergovernmental revenue berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan teknologi informasi Pemerintah Daerah.

Kata kunci: intellectual capital disclosure, teknologi informasi, Pemerintah Daerah.

I. PENDAHULUAN

Era globalisasi yang terjadi saat ini mengantarkan umat manusia kepada kemajuan di berbagai bidang. Kemajuan terpesat yang dapat dirasakan adalah pada bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Begitu juga bagi organisasi-organisasi atau perusahaan, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi mulai mengarahkan perkembangan ekonomi ke arah organisasi yang berbasis informasi dan pengetahuan (Guthrie 2001). Dengan adanya ilmu pengetahuan dan teknologi maka perusahaan akan dapat mengelola sumber daya lainnya dengan efektif dan efisien sehingga akan memberikan keunggulan dalam bersaing (Rupert 1998). Semakin meningkatnya kesadaran manajemen mengenai arti pentingnya sebuah aset tidak berwujud mendorong organisasi menjadi lebih tertarik untuk memberikan prioritas pada pengelolaan aset tidak berwujud tersebut dengan basis pengetahuan dari organisasi, seperti manusia, kekayaan intelektual organisasi dan pemecahan masalah organisasi (Guthrie *et al.* 2001). Menurut Bontis (2004) organisasi mulai mengalami pergeseran paradigma dari *conventional based* menuju paradigma baru dimana pengetahuan organisasi dianggap sebagai kunci keberhasilan keuangan di masa depan. Organisasi mulai menyadari bahwa kunci sukses dalam strategi lingkungan baru adalah

pengelolaan yang baik dari informasi dan pengetahuan Quinn (1992). Hal itu berimplikasi pada penekanan yang lebih besar untuk aset tidak berwujud khususnya pengungkapan kekayaan intelektual seperti informasi teknologi yang dimiliki oleh organisasi. Menurut Guthrie dan Petty (2000), jika intelektual kapital tidak dilaporkan, maka ada risiko bahwa hal itu tidak akan mendapatkan perhatian yang cukup. Canibano *et al.* (2000) menyebutkan bahwa untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan adalah dengan jalan meningkatkan informasi terkait dengan pengungkapan *intellectual capital*.

Ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan Pemerintah Daerah terus mengalami peningkatan. Tahun 2010, dari 1154 laporan masyarakat kepada Ombudsman, instansi yang paling banyak dilaporkan adalah Pemerintah Daerah yaitu sebanyak 360 laporan (31,21%) pengaduan tersebut diakibatkan oleh lamanya perijinan dan sumber daya manusia yang tidak kompeten (Bappenas 2010). Fakta permasalahan di atas adalah dapat diminimalisir dengan adanya penggunaan teknologi informasi, dimana dapat membantu pekerjaan manusia menjadi lebih cepat dan tepat, sehingga dengan adanya teknologi informasi mengurus perijinan menjadi lebih mudah dan cepat.

Berdasarkan permasalahan di atas, penelitian ini berguna untuk mengetahui seberapa besar tingkat pengungkapan teknologi informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia. Selain itu juga untuk mengetahui apakah karakteristik Pemerintah Daerah berpengaruh terhadap pengungkapan teknologi informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia

II. TINJAUAN PUSTAKA

Suwardjono (2006: 578) mendefinisikan pengungkapan merupakan sebuah konsep, metoda dan media tentang bagaimana informasi disampaikan kepada pihak yang berkepentingan. Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah wajib menyusun laporan keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan yang dilampiri dengan Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Laporan keuangan di sektor publik dibuat dengan beberapa alasan, menurut Mardiasmo (2002: 175) diantaranya adalah:

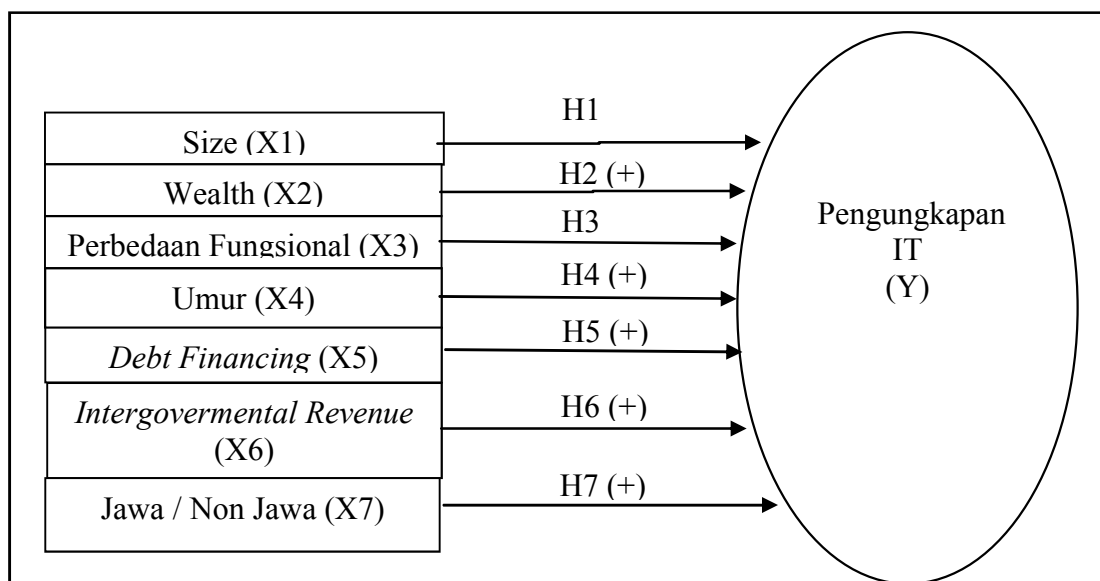
- a. Dari sisi internal bahwa laporan keuangan merupakan alat pengendalian dan evaluasi kinerja manajerial dan organisasi.
- b. Dari sisi eksternal bahwa laporan keuangan merupakan salah satu bentuk mekanisme pertanggungjawaban dan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan.

Sebagai sebuah konsep, *intellectual capital* merujuk pada aset tidak berwujud (*intangible asets*) atau tidak kasat mata (*invisible*), yang berhubungan dengan pengetahuan dan pengalaman manusia serta teknologi yang digunakan (Rupidara 2008). Definisi intelektual kapital lainnya diungkapkan oleh Li *et al.* (2008):

...the possession of knowledge and experience, professional knowledge and skill, good relationship, and technological capacities, which when applied will give organizations competitive advantages.

Salah satu bagian dari *intellectual capital* adalah *Internal Capital* yang di dalamnya terkandung unsur teknologi yang dimiliki oleh sebuah organisasi. *Internal Capital* merupakan kemampuan organisasi atau perusahaan dalam melakukan proses aktivitas rutin harian perusahaan serta struktur yang mendukung usaha karyawan untuk menghasilkan kinerja intelektual yang optimal serta kinerja bisnis secara keseluruhan. *Internal capital* dapat berupa misalnya: sistem operasional perusahaan, budaya organisasi, filosofi manajemen dan semua bentuk *intellectual property* yang dimiliki perusahaan. Internal capital mencakup *Intellectual Property*, *Management Philosophy*, *Management Processes*, *Corporate Culture / value*, *Information / networking sistem*, *Financial Relation*, dan *Promotional Tools* (Schneider dan Samkin 2008).

Penelitian ini menggunakan teori organisasi berdasarkan penelitian Patrick (2007) dimana variabel independen dalam penelitian ini karakteristik Pemerintah Daerah dengan menggunakan ukuran (*size*) Pemerintah Daerah yang diproksikan dengan total aset, kemakmuran (*wealth*) diproksikan dengan menggunakan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Perbedaan Fungsional yang diproksikan dengan jumlah Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) yang ada di Pemerintah Daerah, umur (*age*) diproksikan dengan umur Pemerintah Daerah, budaya yang diproksikan dengan Jawa Dan Non Jawa, *Debt Financing* yang diproksikan dengan *debt to aset*, *intergovemental revenue* diproksikan dengan menggunakan perbandingan antara jumlah dana perimbangan dengan jumlah total pendapatan. Kerangka konseptual dari penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 1 Kerangka Konseptual

Hipotesis dari variabel independen di atas adalah :

H1 : Ukuran Pemerintah Daerah berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan teknologi informasi.

H2: PAD berpengaruh positif terhadap pengungkapan teknologi informasi.
H3: Jumlah SKPD berpengaruh positif terhadap pengungkapan teknologi informasi.
H4: Umur Pemerintah Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan teknologi informasi.
H5: Debt financing berpengaruh positif terhadap pengungkapan teknologi informasi.
H6: Intergovernmental revenue berpengaruh positif terhadap pengungkapan teknologi informasi.
H7: Pemerintah Daerah di Pulau Jawa dan non Jawa berpengaruh positif terhadap pengungkapan teknologi informasi.

III. METODE PENELITIAN

Populasi dalam penelitian ini adalah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten/Kota se-Indonesia. LKPD merupakan laporan keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah sebagai wujud pertanggungjawaban atas dana yang dikelola dari masyarakat. Total populasi adalah 514 kabupaten/kota dengan menggunakan LKPD tahun anggaran 2014 yang diakses melalui Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Sampel pada penelitian ini berjumlah 170 LKPD.

Teknik pengambilan sampel dilakukan secara *purposive sampling* yang berarti sampel yang digunakan adalah sampel yang spesifik yang menyediakan informasi yang dibutuhkan atau sampel yang diperoleh dari ketentuan yang dibuat oleh peneliti (Sekaran dan Bougie 2013: 252). Kriteria atau pertimbangan yang dapat dijadikan sampel pada penelitian ini antara lain :

1. Pemerintah Daerah seluruh Indonesia yang mempublikasikan laporan keuangan pada tahun anggaran 2014 dan telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
2. Menyajikan LKPD per Desember 2014 secara lengkap.
3. Memiliki informasi variabel-variabel yang diukur yaitu PAD dan SKPD.

Formula Pengukuran tingkat pengungkapan teknologi informasi yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada penelitian White *et al.* (2007) sebagai berikut :

$$\text{Skor} = (\sum_{i=1}^m di / M) \times 100 \% \quad (1)$$

Dimana di adalah jumlah pengungkapan teknologi informasi, dengan nilai 1 jika ditemukan dalam LKPD dan bernilai 0 jika tidak ditemukan dalam LKPD. M adalah jumlah maksimum pengungkapan teknologi informasi yaitu 170.

Olah data dilakukan dengan program SPSS IBM versi 20 dengan menggunakan alat analisis regresi logistik. Uji regresi logistik tidak memerlukan syarat uji asumsi klasik (Ghazali 2011:333). Pengujian *goodness of fit model* dilakukan dengan menggunakan uji *Hosmer and Lemeshow's* (Ghazali 2011: 341). Model logit dalam penelitian ini dapat dituliskan sebagai berikut (Ghazali 2011: 336):

$$P = \frac{1}{1 + e^{-(b_0 + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + b_5X_5 + b_6X_6 + b_7X_7)}} \quad (2)$$

Dimana : $x_1 = \text{size}$, $x_2 = \text{wealth}$, $x_3 = \text{perbedaan fungsional}$, $x_4 = \text{umur}$, $x_5 = \text{debt financing}$, $x_6 = \text{intergovernmental revenue}$, $x_7 = \text{Jawa non Jawa}$

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian dari sampel sejumlah 170 LKPD, hanya terdapat 65 Pemerintah Daerah yang mengungkapkan teknologi informasi dalam laporan keuangannya. dengan kata lain pengungkapan teknologi informasi yang diungkapkan oleh Pemerintah Daerah mempunyai rata-rata sebesar 38,2 %.

Tabel 1
Uji Goodness of Fit

Step	Chi-square	df	Sig.
1	11,111	8	,195

Model fit dapat dilihat dengan tabel *hosmer and Lemeshow's*, dimana jika nilai sig. lebih kecil dari 0,05 maka model ditolak. Jika sig. lebih besar dari 0,05 maka model diterima. Pada tabel di atas diketahui nilai sig. adalah 0,195 nilai tersebut lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa model dapat diterima.

Tabel 2
Uji Ketepatan Prediksi

Observed	Predicted		
	ITD		Percentage Correct
	0	1	
ITD 0	105	0	100,0
1	65	0	,0
Overall Percentage			61,8

Berdasarkan *classification model* diketahui bahwa nilai secara keseluruhan ketepatan klasifikasi adalah 61,8 % atau uji ketepatan model 61,8%.

Tabel 3
Uji Logistic Regression

	B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)
Debt_Financing	21,760	12,766	2,905	1	,088	2820544887,35 1
Intergovernmental_Revenue	3,354	1,657	4,098	1	,043	28,623
Size	,000	,000	1,455	1	,228	1,000
Wealth	,000	,000	,134	1	,714	1,000
Perbedaan_Fungsional	-,008	,009	,697	1	,404	,993
Umur	,008	,008	,915	1	,339	1,008
Jawa_Non_Jawa	,822	,438	3,522	1	,061	2,276
Constant	-3,788	1,580	5,745	1	,017	,023

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa variabel *size*, *wealth*, perbedaan fungsional, umur, *debt financing*, dan Jawa non Jawa tidak mempengaruhi pengungkapan informasi teknologi dalam LKPD karena nilai sig. lebih dari 0,05. Hanya variabel *intergovernmental revenue* saja yang mempengaruhi pengungkapan informasi teknologi dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah adalah.

Hal ini dapat disebabkan oleh semakin tingginya dana perimbangan yang diberikan pusat ke Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Daerah akan berusaha memastikan bahwa dana yang diberikan dipergunakan untuk kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat, salah satunya dengan memanfaatkan penggunaan teknologi informasi yang dapat mendukung proses pengelolaan keuangan dan memperbaiki kualitas layanan masyarakat.

V. KESIMPULAN

1. Pengungkapan teknologi informasi yang diungkapkan oleh Pemerintah Daerah mempunyai rata-rata sebesar 38,2 %. Nilai yang relatif rendah ini dapat disebabkan oleh rendahnya pemahaman dan kesadaran Pemerintah Daerah tentang pentingnya pengungkapan teknologi informasi dalam LKPD, selain itu juga dapat disebabkan oleh keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
2. Variabel *intergovernmental revenue* mempengaruhi pengungkapan teknologi informasi dalam LKPD.

DAFTAR PUSTAKA

Bappenas (Direktorat Aparatur Negara Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional). 2010. *Laporan Kajian Manajemen Pengaduan Masyarakat dalam Pelayanan Publik*.

- Canibano, L, Garcia Ayuso, M., dan Sanchez,P. 2000. Accounting for intangibles: a literature review:. *Journal of Accounting literature*, Vol.19, page 102-130.
- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 19*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Guthrie, J. and Petty, R. 2000. Intellectual capital: Australian annual reporting practices. *Journal of Intellectual Capital*. Vol. 1 No. 3, page 241-51.
- Guthrie, J. 2001. The management, measurement and the reporting of intellectual capital. *Journal of Intellectual Capital*, Vol. 2 No. 1, page 27-41.
- Guthrie, J., Petty, R. and Johanson, U. 2001. Sunrise in the knowledge economy, managing, measuring and reporting intellectual capital. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*. Vol. 14 No. 4, page 365-82.
- Li, Pike, dan Haniffa. 2008. Intellectual Capital Disclosure and Corporate Governance Structure in UK Firms. *Accounting and Business Research*, vol. 38 (2), page 137-159.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Patrick, Patricia A. 2007. *The Determinants of organizational Innovativeness: the adaption of GASB 34 in Pennsylvania Local Government*. Thesis. The Pennsylvania State University.
- Quinn, J.B. 1992. *Intelligent Enterprise: A Knowledge and Service Based Paradigm for Industry*, New York: Free Press.
- Rupert, Booth. (1998), "The Measurement of Intellectual Capital", *Management Accounting*. (Nov), Vol. 76, page 26-28
- Rupidara, Neil. 2008. Modal Intelektual dan Strategi Pengembangan Organisasi dan Sumber Daya Manusia. *Pusat Studi Kawasan Timur Indonesia*: Universitas Kristen Satya Wacana
- Schneider, Annika dan Grant Samkin, (2008),"Intellectual capital reporting by the New Zealand local government sector", *Journal of Intellectual Capital*, Vol. 9 Iss 3 page 456 – 486
- Sekaran dan Bougie. 2013. *Research methods for business*. United Kingdom: Wiley Publishes
- Suwardjono. 2005. *Teori Akuntansi: Perencanaan Pelaporan Keuangan*. Yogyakarta: BPFE.
- Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
- White, Gregory, Alina Lee, dan Greg Tower, (2007),"Drivers of Voluntary Intellectual Capital Disclosure in Listed Biotechnology Companies". *Journal of Intellectual Capital*. Vol. 8 Iss 3 page 517 – 537